



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(MUSRENBANG)

(Studi Kasus: Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung)

Skripsi

Oleh

Putu Dinda Mahadewi Aryadina

2016310120

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No.3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG)**

Studi Kasus Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung

Skripsi

Oleh

Putu Dinda Mahadewi Aryadina

2016310120

Pembimbing

Hubertus Hasan Ismail, Drs., M.Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Putu Dinda Mahadewi Aryadina
Nomor Pokok : 2016310120
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Studi Kasus : Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang
Sarjana Pada Selasa, 26 Januari 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Tutik Rachmawati, S.I.P., M.A., Ph.D

:

Sekretaris

Hubertus Hasan, Drs., M.Si

:

Anggota

Gina Gingsih Yuwono, Dra., M.Si.

:

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putu Dinda Mahadewi Aryadina

NPM : 2016310120

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(MUSRENBANG) Studi Kasus Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota
Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya tulis yang pernah dibuat dan diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Januari 2021



Putu Dinda Mahadewi A.

ABSTRAK

Nama : Putu Dinda Mahadewi Aryadina
NPM : 2016310120
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (MUSRENBANG) Studi Kasus Kelurahan Dago
Kecamatan Coblong Kota Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Studi Kasus Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam penelitian ini menggunakan teori 8 (delapan) tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R Arnstein, yang terdiri dari *Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada tingkat mana partisipasi warga masyarakat didalam kegiatan musrenbang di kelurahan Dago sesuai dengan tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R Arnstein.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan pengurus RT/RW, aparat pemerintah Kelurahan Dago seperti Ibu Lurah, Sekretaris Lurah Kelurahan Dago, Kasub Ekbang & LH, dan Pegawai IT Kelurahan Dago.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Rembuk RT, Rembuk RW dan Musrenbang Kelurahan Dago berada di tingkat *Tokenism*” yaitu *Placation*, hal ini ditunjukkan bahwa warga masyarakat Kelurahan Dago sudah mengetahui pembangunan apa yang sedang berjalan di lingkungannya dan sudah diberikan hak untuk mengeluarkan kritik dan saran didalam kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan namun masyarakat sendiri tidak yakin 100% jika kritik dan saran itu akan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan/pemerintah daerah didalam penentuan keputusan akhir.

Kata Kunci : Musrenbang, Partisipasi Masyarakat, Masyarakat

ABSTRACT

Name : Putu Dinda Mahadewi Aryadina
NPM : 2016310120
Title : *Citizen Participation in Musrenbang Activities At Dago sub-district, Coblong, Bandung City*

This research is entitled Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Studi Kasus Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. This study used the theory *Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation* by Sherry R Arnstein, which consists of *Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation*. In accordance with the formulation of the problem that has been determined, this study aims to describe the level of community participation in musrenbang activities in Kelurahan Dago.

The research method used in this study is qualitative research method, using case study approach. The technique used in data collection by in-depth interviews with RT / RW administrators, Kelurahan Dago government officials such as the Head of the Village, the Secretary of the Village Head of Dago Village, the Head of Sub-Department of Ekbang & LH, and IT Staff of the Dago Village.

The results of the study indicate that the implementation of Rembuk RT, Rembuk RW, and Musrenbang in Kelurahan Dago were at the Tokenism level, namely "*Placation*", this indicated that the society of Kelurahan Dago already knew what developments were going on in their environment and had been given the right to issue criticisms and suggestions inside. Development planning deliberation activities but the community itself is not 100% sure if the criticism and suggestions will be considered by the power holders / local government in determining the final decision making.

Keyword : Musrenbang, Public Participation, Society

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Studi Kasus Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung” tujuan penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (s1) pada program Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Indraswari, M.A., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan
3. Bapak Hubertus Hasan Drs. M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah sabar membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini
4. Kepada Buyutku yang telah tenang diatas sana, terimakasih selama penulis berada dirumah, penulis tidak pernah merasa sepi karena kelucuan dan canda tawamu yang penulis dan keluarga rindukan.
5. Kepada Pekak, Ninik, Mamak, Bapak, Dandi, Enjel, dan Tutde yang selalu memberikan semangat kepada penulis sejak awal kuliah dan saat pembuatan skripsi ini, hingga saat ini.
6. Untuk Bukmang, Buktut keluargaku yang sudah menjadi bagian dari keluarga orang lain. Terimakasih atas perhatiannya untuk penulis dari berbagai hal dari penulis masih balita hingga saat ini.
7. Terimakasih teruntuk teman-teman satu jurusan Administrasi Publik yang telah menjadi bagian keluarga di kampus 3 Unpar Bandung selama kuliah.

8. Terimakasih terkhusus untuk Putu Diky yang selalu memberikan support material maupun dorongan moral
9. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi, yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya serta membalas semua kebaikan mereka. Dengan penuh kerendahan hati penulis sangat mengharapkan bimbingan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan dari materi skripsi ini.

Akhirnya skripsi ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, semoga dapat bermanfaat.

Bandung, 11 Januari 2021

Dinda Mahadewi

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	5
ABSTRACT	6
KATA PENGANTAR.....	7
DAFTAR ISI	9
BAB I	12
PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang Masalah.....	12
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	16
BAB II.....	17
PERENCANAAN PARTISIPATIS DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN LOKAL	17
1.1 Partisipasi.....	17
2.2 Perencanaan Partisipatif.....	19
2.3 Elemen Perencanaan Partisipatif	20
2.4 Jenjang Partisipasi	20
2.5 Proses Perencanaan Partisipasi.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Fokus Penelitian	30
3.4 Sumber Data.....	30
3.5 Prosedur Pengumpulan Data.....	31
3.6 Analisis Data.....	31
3.7 Variabel Penelitian	33
3.8 Definisi Operasional.....	34
3.8.1 Operasional Variabel.....	34

3.8.2	Definisi Teoritis	35
BAB IV		36
PROFIL PENELITIAN		36
4.1	Gambaran Umum Kelurahan Dago	36
4.2	Profil Kelurahan Dago	37
4.2.1	Data Statis	37
4.2.2	Data Dinamis	41
4.3	Musrenbang di Kelurahan Dago	42
4.4	Visi dan Misi Kelurahan Dago	42
4.5	Struktur Organisasi Kelurahan Dago	44
BAB V		45
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG DI KELURAHAN DAGO KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG		45
5.1.	Tahapan Persiapan Musrenbang	46
5.2	Pra – Rembuk Warga	47
5.3	Musrenbang Rembuk Warga Tingkat RT	47
5.4	Musrenbang Rembuk Warga Tingkat RW	49
5.4.1	Pengertian	49
5.4.2	Tujuan	50
5.4.3	Tempat dan Waktu Pelaksanaan	50
5.4.4	Hasil Usulan Program	50
5.5	Musrenbang Tingkat Kelurahan Dago	51
5.6	Tingkat Partisipasi Masyarakat	62
BAB VI		65
KESIMPULAN DAN SARAN		65
6.1	Kesimpulan	65
6.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
DOKUMEN		70
LAMPIRAN		71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan (*discretionary power*) kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah daerah. Tujuan ini mengandung makna adanya perubahan kepada kehidupan pemerintah daerah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat, dalam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Selain itu, untuk menciptakan *civil society* dalam kehidupan berpemerintahan, ber masyarakat, dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *Good Governance* yang menghasilkan sikap keterbukaan, nilai demokrasi, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggung jawab kepada rakyat. Dampak yang diharapkan adalah terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintah yang awalnya sentralistik mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralik dengan memberikan keleluasan otonomi daerah. Pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.¹

Melalui Otonomi Daerah diharapkan terjadi perubahan gaya pendekatan yang tadinya menggunakan arah top down menjadi menggunakan pendekatan yang sifatnya dari bawah atau *bottom-up*, pembangunan dengan pendekatan *bottom-up* disini merupakan pembangunan yang dimulai dari pembangunan dari bawah atau melalui tingkat desa/kelurahan yang menjadikan masyarakat desa/kelurahan sebagai obyek (sasaran) dan sekaligus obyek (alat) dari proses pembangunan desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah disini memiliki peran sebagai pemberi arahan (mengarahkan), bimbingan, dan bantuan fasilitas yang dibutuhkan, sedangkan masyarakat merupakan pemeran utama didalam proses pembangunan tersebut.²

Perubahan pendekatan dari *top down* menjadi *bottom-up* tersebut diwujudkan melalui proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat masyarakat. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, yaitu yang disebut dengan musyawarah perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat menjadi Musrenbang. Musrenbang diawali dari Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan. Musrenbang Kelurahan

¹(Dr. I.Nyoman Sumaryadi)

²(Riedel Legi, W. Y. Rompas, msi, Jericho d. Pombengi, 2015)

adalah “forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan disini dilaksanakan setiap bulan januari dengan berfokus pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.”³

Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah kelurahan bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang berarti akan mampu membangun sebuah kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan kelurahan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun dari luar kelurahan.

Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Musyawarah adalah istilah yang tepat dan memiliki arti yang jelas, yaitu sebuah forum yang dilakukan secara merembung dan berakhir menghasilkan sebuah kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama, tidak hanya sosialisasi mengenai informasi saja. Proses musrenbang tidak dapat dilaksanakan hanya dengan acara yang sebagian besar hanya diisi dengan sambutan-sambutan atau pidato-pidatio. Inti dari kegiatan Musrenbang disini adalah partisipasi aktif secara langsung yang diperoleh dari warga.

Musrenbang kelurahan merupakan suatu forum dialogis yang dilakukan antara pemerintah kelurahan dengan *stakeholder* kelurahan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat dilakukan untuk memajukan keadaan kelurahan. dalam menyelenggarakan musrenbang kelurahan, pemerintah kelurahan bersama seluruh komponen warga bekerjasama dalam melakukan berbagai upaya yang dapat memajukan keadaan kelurahan melalui program pembangunan kelurahan.⁴

Musyawarah Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan kelurahan untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Kelurahan disini dilaksanakan setiap bulan Januari dengan berfokus pada Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan.⁵

Program Musrenbang dikelola dan dilaksanakan oleh forum yang dibentuk dari warga masyarakat kelurahan yaitu ada keterwakilan wilayah (RT/RW),keterwakilan berbagai

³ Dikutip dari <http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/41-musrenbang-kelurahan> pada 13 November 2020 pukul 21.20

⁴ Dikutip dari <http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/41-musrenbang-kelurahan> pada 14 November 2020 pukul 16.00

⁵ Dikutip dari <http://kawasan.bappenas.go.id/musrenbang/41-musrenbang-kelurahan> pada 13 November 2020 pukul 21.20

sektor (ekonomi/pertanian/kesehatan/pendidikan/lingkungan), keterwakilan kelompok usia (generasi muda dan generasi tua), keterwakilan kelompok sosial dan perempuan (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, kelompok marjinal), keterwakilan tiga unsur tata pemerintahan (pemerintah kelurahan, kalangan swasta/bisnis, masyarakat umum), keterwakilan berbagai jenis organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan kelurahan.⁶

Kegiatan Musrenbang kelurahan sendiri turunan dari program PIPPK yang merupakan program turunan dari pemerintah Kota Bandung dikelola dan dilaksanakan oleh masyarakat melalui RW (Rukun Warga), PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Lembaga Karang Taruna, dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) serta kelurahan dan kecamatan. Perencanaan dilakukan oleh RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM bersama dengan masyarakat melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kelurahan. Setelah disetujui, program dan kegiatan akan dikelola oleh Camat selaku Pengguna Anggaran dan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Seiring kegiatan berjalan, Camat dan Lurah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota. Keseluruhan proses ini akan diawasi oleh Pengawas Internal dan Pengawas Eksternal (masyarakat)

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Kelurahan Dago Kecamatan Coblong merupakan salah satu kelurahan di kota Bandung yang setiap tahunnya pada bulan Januari menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kelurahan ini dipilih dengan mempertimbangkan masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian:

1. Minimnya keterlibatan setiap warga masyarakat karena didalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan Dago hanya dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, organisasi kemasyarakatan, beserta aparat pemerintah yang sudah diwenangkan untuk hadir.
2. Warga masyarakat tidak yakin betul jika usulan maupun saran dan kritik yang telah mereka usulkan pada musyawarah dipertimbangkan dalam penentuan keputusan akhir program pembangunan yang akan dilakukan di lingkungan mereka.

⁶ Dikutip dari lampiran Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan hal. 11

Sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa musrenbang tingkat Kelurahan harus di mulai dari tingkat RW. Dari hasil wawancara dengan sejumlah Ketua RW⁷, “menyatakan bahwa yang diundang hadir dalam musyawarah di tingkat RW adalah pengurus RW dan RT, organisasi kemasyarakatan tokoh masyarakat. Tapi pada kenyataannya tidak semuanya menghadiri undangan tersebut. Selain itu, walaupun yang diundang tersebut hadir yang bersangkutan bukan merupakan pengurus inti, tetapi hanya sekedar perwakilan, khususnya dari organisasi kemasyarakatan.” Lebih lanjut dikemukakan bahwa “dalam musyawarah tersebut waktu yang ada digunakan untuk mendengarkan penjelasan dari Lurah dan atau yang mewakilinya”. Selain itu, program-program pembangunan yang diusulkan dari tingkat RT atau RW harus selaras dengan rencana pembangunan tingkat kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, apabila dihubungkan dengan tingkat warga masyarakat dalam partisipasi musrenbang ada kecenderungan sebagai berikut:

1. Keterlibatan warga dalam menghadiri Musrenbang diwakili oleh Pengurus RT/RW dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat.
2. Program pembangunan yang diusulkan oleh peserta musyawarah harus selaras dengan rencana pembangunan Kelurahan.
3. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan untuk sementara bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih dibatasi, baik dalam kehadiran maupun untuk menyampaikan usulan-usulan program pembangunan

Berdasarkan informasi tersebut, maka dalam mendeskripsikan tingkat partisipasi warga Kelurahan Dago kecamatan Coblong akan menggunakan tingkatan partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R Arnstein yang terdiri dari *Citizen Control, Delegated Power, Partnership, Placation, Consultation, Informing, Therapy, Manipulation*.

Berdasarkan tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, pertanyaan penelitiannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tingkat partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein, pada tingkat partisipasi yang mana keterlibatan warga masyarakat Kelurahan Dago dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan tingkat Kelurahan Dago pada tahun 2019 ?

⁷ Hasil wawancara dengan Ketua RW pada tanggal 16 November 2020

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pada tingkat partisipasi yang mana keterlibatan warga masyarakat Kelurahan Dago dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan Dago pada tahun 2019.